

Jepang Abad 18-19

NIHON/NIPPON I

Sejarah Asia Timur
Pendidikan Sejarah
Pertemuan 12,13

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd
Email: ariayuliantri@uny.ac.id

Abad 18

- Shogun ke delapan Eyoshimune, keadaan ekonomi Jepang merosot, kekayaan menumpuk pada kaum pedagang, petani semakin miskin.
- Muncul kelompok-kelompok yang tidak menyenangkan Tokugawa
- Kelompok yang tidak menyenangkan Tokugawa meminta dukungan pada Tenno

Negara Terbuka

- 1792, Rusia membuka politik Isolasi Jepang. Dilakukan dua kali dengan mengirimkan utusan kepada Bakufu, namun gagal.
- Rusia mengirimkan pasukannya untuk menyerang Hokkaido

Negara Terbuka

- 1853, AS membuka ketertutupan Jepang dengan mengirimkan Komandan Squardon Hindia Timur yang bernama Komodor Perry.
- Dalam negeri Jepang terjadi perselisihan antara kelompok pro dan kontra Amerika
- Jepang menandatangani perjanjian dengan AS tahun 1854 "Pelabuhan dan Hokkaido akan terbuka untuk Shimodakepentingan kapal-kapal Amerika Serikat"

Menuju Jepang Modern

- Perjanjian AS disusul dengan perjanjian bangsa Eropa lainnya
- Penandatanganan perjanjian ini menyebabkan golongan Bakufu tidak disenangi banyak kalangan.
- Perekemonian Jepang kacau akibat perdagangan Internasional.
- Tokugawa sebagai Shogun dinilai gagal.

Kelompok Kontra

- Kelompok Satsuma di daerah Kagashima
- Kyushu dan Choshu dari sebelah Barat pulau Honshu.
- 1868, kedua kelompok membentuk aliansi untuk menumbangkan Bakufu, yang didukung oleh Tennon.
- 1868 Shogun ke-15 (Yoshibone) menyerahkan kekuasaan kekuasaan tanpa pertumpahan darah.
- Kekuasaan Tokugawa selama 265 tahun berakhir.

- Ibu Kota dipindahkan ke Edo (diganti Tokyo), 1869.
- Kaisar I, Mutsuhito dibantu kelompok Satsuma dan Choshu melakukan medernisasi yang dikenal dengan "Restorasi Meiji".

- Orang-orang di bawah kaisar yang dipimpin Okubo Toshimichi melancarkan kebijakan:

1. Menghilangkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Jepang (kelompok Samura, petani, pedagang)
2. Memajukan Pendidikan (wajib belajar 4 tahun), dibarengi penerjemahan buku-buku
3. Meningkatkan kemampuan sendiri dan lepas dari bantuan luar negeri. Meningkatkan ekspor ke LN, meniru teknologi, dll
4. Mempertahankan kekuatan bangsa dengan mengadakan wajib militer yang diatur dalam Undang-undang tahun 1872
5. Penyempurnaan bidang perpajakan, penerimaan pajak yang stabil dengan pembayaran tunai.
6. Modernisasi dalam bidang politik, dengan sistem demokrasi (mendirikan Parlemen dan Konstitusi)

Perkembangan Konstitusi

- 29 November 1990, merayakan bentuk parlemen sebagai bentuk demokrasi
- Konstitusi Meiji: Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan memiliki kekuatan sama
- Sistem Parlemen
- Badan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif membantu sebagai penasehat kaisar

- Kebijakan LN tidak menggunakan UU.
- Kabinet I dibentuk tanggal 22 Desember 1885, dengan PM Ito Hirobumi dari kelompok Choshu.
- 1 Juli 1889, mengadakan pemilihan umum untuk memilih 300 anggota Majelis Rendah.
- Bulan Juni-Juli diadakan pemilihan Majelis Bangsawan, seperti pemilihan Majelis Tinggi Inggris.

Syarat Anggota Majelis Rendah

- Berusia 25 tahun ke atas dan dipilih dari pembayar pajak yang lebih 15 yen per tahun.

Agresi Jepang

- Agresi militer didukung semangat *fukoku kyohei* (*enrich the country, strengthen the nation*).
- Dijatuhkannya bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945 memaksa Jepang menandatangani perjanjian Postdam.

Dampak Perang

1. Korban 1.800.000
2. Kekayaan negara hancur sebesar 25%
3. Industri musnah 30 %
4. Kehilangan wilayah 65%
5. Jepang bersedia berada di bawah pengaturan Sekutu

Kebijakan AS

- 2 September 1945, AS menjalankan program demiliterisasi dan demokratisasi yang dilaksanakan di bawah Jenderal Douglas Mac Arthur sebagai komandan SCAP (Supreme Commander for the Allied Power)

Kebijakan Demiliterisasi

- Upaya untuk melumpuhkan dan menghilangkan potensi militer Jepang (melakukan pelucutan perang baik dalam maupun luar negeri yang dikuasai Jepang), penghapusan kementerian angkatan darat dan angkatan laut, penutupan industri pendukung militer, mengadili mereka yang masuk dalam daftar penjahat perang melalui pengadilan militer Internasional (International Military Tribunal For The Far East).
- Dekokratisasi dilakukan agar masyarakat lebih cinta damai sehingga tidak bangkit nasionalisasi militer dalam jiwa bangsa Jepang (penghapusan lembaga kekaisaran)
- SCAP memberikan kepada kelompok komunis untuk berkuasa pada tahun 1947 (tetapi tidak berlangsung lama)

Dekosentrasi ekonomi

- SCAP melakukan dekosentrasi ekonomi, pembentukan sarekat buruh, dan pembaharuan dalam bidang pertanian.
- Dekosentrasi ekonomi dilakukan dengan pembubaran zaibatsu, dengan membubarkan perusahaan Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, dan Yoshuda. Sejumlah 83 semi pemilikan membubarkan diri

- Mengundang UU anti monopoli pada April 1947
- Desember 1947 membuat UU anti pemusatan Ekonomi, untuk mencegah kekuatan ekonomi yang berlebihan masing-masing perusahaan.
- Pada tahun 1948 sekitar 325 perusahaan domestik diperintahkan memecahkan diri.

Sumber

- Kevin O' Donnell. 2009. *History of Ideas*. Ab. Jan Riberu. *Sejarah Ide-ide*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leo Agung. 2012. *Sejarah Asia Timur 1*. Yogyakarta: Ombak.
- ----- .2012. *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Ombak.
- Zuhijar Hafiza, *Skripsi*, "Prospek dan Kendala Pengembangan Kekuatan Militer Jepang Pasca Perang Dingin", UGM, 1994.
- Usman Salam, *Politik dan Pemerintahan Jepang*, 1990, Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama, UGM
- Yoshiro Nakasone and Michio Watanabe, *Japanese Trade Policy Formulation*, 1983, Japan: Praeger.